

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku atau Kitab

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Akademika Presindo.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana..
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mannan, Abdul. 2002. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet.II. Jakarta : Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. XXXII. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2003. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, Imam. 2007. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: KDT.

## **B. Penelitian dan Jurnal**

- Firdaus, Ali. 2017. “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung)”, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung)
- Ilmiyati dan Hasanah, Uswatun. 2017. “Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)” dalam Jurnal “Istiqlah”; Jurnal Penelitian Ilmiah LP2M IAIN Palu, Vol. 5, No. 1, (Juni 2017)
- Ismail. 2015. ”Potret Kinerja dan Pelayanan Publik Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kabupaten Tangerang: Kasus KUA Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi”. Dalam Jurnal “Penamas”; Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Kementerian Agama RI, Vol. 28, No. 3, (Oktober-Desember 2015)
- Saifuddin, Ahmad. 2008. “Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Menurut Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. (Tesis: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Soekanto, Soerjono. 1977. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, dalam “Jurnal Hukum dan Pembangunan”, Vol. 7 No. 6 (1977).

### **C. Terbitan Al-Quran/UU/ /PP**

Departemen Agama RI. 2005. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### **D. Majalah**

Mahkamah Konstitusi. *Majalah Konstitusi* Nomor 61 Februari 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

### **E. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahhsa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

**F. Internet**

“Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum”,  
[www.badilag.net](http://www.badilag.net) (Diakses pada hari Ahad, 26 April 2020)

“Nasab Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan”, dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net) (Diakses pada hari Ahad, 26 April 2020)